



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi bisnis yang sangat besar, dilihat dari kekayaan alam yang dimiliki olehnya serta banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Para pelaku bisnis dari dalam maupun luar negeri pun mulai berdatangan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Banyak sekali bisnis yang berkembang di Negara ini serta memiliki beragam kategori, salah satunya adalah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pelaku bisnis di Indonesia biasanya adalah pemilik bisnis sendiri atau bahkan sebuah perusahaan. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia pada umumnya berdatangan dari luar negeri atau perusahaan asing, namun tidak jarang juga perusahaan milik anak negeri.

Salah satu perusahaan asing yang cukup berkembang di Indonesia sejak tahun 1936 adalah PT. Freeport Indonesia. PTFI ini merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Amerika yang beroperasi menambang, memproses serta melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak.

Sifat dari perusahaan pertambangan seperti PT. Freeport Indonesia pada dasarnya berdampak pada lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar area pertambangan. Oleh sebab itu diperlukan peraturan-peraturan dari Pemerintah untuk mengatur proses operasi dari PT. Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain di bidangnya. Salah satu peraturan pemerintah yang mengantur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017.

Perusahaan asing dan dalam negeri tentunya memerlukan suatu divisi tertentu pada perusahaan yang memiliki *jobdesk* untuk berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah ini merupakan salah satu *stakeholder* yang sangat berpengaruh

bagi suatu perusahaan. Divisi terkait biasanya dinamakan *Government Relations Department*.

Government relations (Hubungan dengan Pemerintah) merupakan seni membangun hubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan (eksekutif, legislatif) yang mempengaruhi perusahaan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional (Kasali, 2000). Tugas *government relations* di antaranya: *monitoring* dan interpretasi langkah-langkah pemerintah, menggali data dari pemerintah, menyampaikan timbal balik dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah, serta membangun posisi yang baik dengan pemerintah melalui komunikasi.

PT. Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan asing yang tentunya memiliki suatu *department* yang bertujuan untuk berkordinasi dengan pemerintah Indonesia guna kelancaran operasinya yaitu *Government Relations Department* yang lokasinya di *Office Buildings* PTFI Kuala Kencana.

Aktivitas magang yang penulis lakukan adalah pada *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia dan memiliki tiga kategori tugas utama yaitu *Internal Public Relations*, *External Public Relations* dan *Administration Officer*.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Adapun maksud kerja magang ini, yaitu:

- Menambah pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa untuk mengetahui cara menghadapi dan menangani masalah terkait *public relations*;

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Adapun tujuan kerja magang ini, yaitu:

- Mempelajari fungsi *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia dalam mendukung kerja perusahaan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kegiatan magang bertempat di:

Kantor *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia

Alamat: Jl. Mandala Raya Kuala Kencana 99920 Papua, Indonesia

Waktu kegiatan magang berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 27 Juni s/d 26 Agustus 2016 dengan jadwal kerja sebagai berikut:

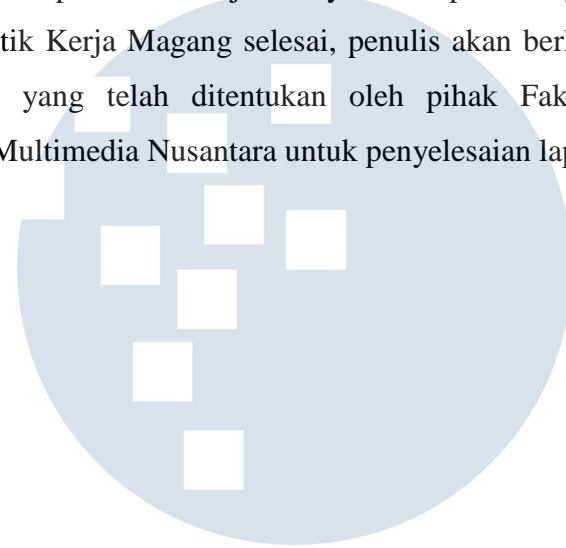
- Hari kerja : Senin - Jumat
- Jam kerja : 08.00 WIT - 17.00 WIT
- Jam istirahat : 11.30 WIT - 13.30 WIT

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Berikut ini Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang yang penulis lakukan di *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia:

1. Melakukan pengisian formulir pengajuan kerja magang KM-01 yang ditandatangani Ibu Bertha Sri Eko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
2. Menetapkan perusahaan yang akan dituju dengan melampirkan surat pengantar KM-02 sebagai surat resmi dari Kampus UMN yang ditandatangani Ibu Bertha Sri Eko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
3. Mengirimkan Surat Pengantar Kerja Magang beserta dengan Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dan beberapa persyaratan lainnya yang ditujukan kepada Pimpinan *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan *Government Relations Department* PT. Freeport Indonesia, penulis menyampaikannya kepada pihak kampus serta ditukar dengan Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, dan Formulir Realisasi Kerja Magang dari Universitas Multimedia Nusantara.

5. Sebelum melakukan Praktik Kerja Magang, penulis telah mengikuti seminar pembekalan magang yang diselenggarakan oleh pihak Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
6. Selama praktik kerja magang, penulis mengikuti semua peraturan dan tata tertib perusahaan serta melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan (*supervisor*) maupun rekan kerja lainnya dan dapat bekerjasama dengan baik.
7. Setelah Praktik Kerja Magang selesai, penulis akan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara untuk penyelesaian laporan magang.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA